



Sri Sultan: Jangan Ada Korupsi

YOGYAKARTA. *Joglo Jogja* – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, tidak akan memberikan keringanan ataupun dukungan dalam bentuk apapun pada oknum yang terbukti melakukan korupsi. Hal ini karena korupsi memperlambat pembangunan, menimbulkan ketidakefisienan, juga meningkatkan ongkos niaga. Lantaran, kerugian dari pembayaran ilegal berdampak negatif terhadap kesejahteraan umum.

Ia menuturkan, korupsi yang dilakukan oleh satu oknum saja sudah sangat merugikan dan memangkas hak masyarakat luas untuk sejahtera. Semakin luar biasa dampaknya apabila korupsi dilakukan terstruktur, maka kerugian negara serta kesengsaraan rakyat tentu tidak bisa dihindari.

“Seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi mendelegitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, terutama *trust* dan toleransi. Sehingga menghambat proses demokrasi dan penyelenggaraan *good governance*,” paparnya kemarin.

■ Baca **SRI** ... Hal II



HUMAS@JOGLO.JOGJA

“Seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi mendelegitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, terutama *trust* dan toleransi..”

Sri Sultan Hamengku
Buwono X
Gubernur DIY

Sri Sultan: Jangan Ada Korupsi

sambungan dari hal Joglo Jogja

Gubernur DIY tersebut berharap, pemahaman dan edukasi pencegahan korupsi diintensifkan dan diintegrasikan secara multi sektor dan multi segmen sejak usia dini. Hal ini sebagai upaya preventif agar negara dapat dikelola secara bersih dan bermartabat.

Selain itu, menurutnya, satu OTT (Operasi Tangkap Tangan) hanya akan menyelesaikan satu kasus. Namun, edukasi sejak dini dan berkelanjutan akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten korupsi dari generasi ke generasi.

Sri Sultan juga menegaskan, tidak akan memberi toleransi ASN maupun pejabat di DIY yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dirinya tidak akan sedikitpun memberikan pembelaan jika yang

bersangkutan terbukti melakukan kejahatan tersebut.

Pihaknya memastikan, tidak akan menghalangi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan tugasnya. Yakni apabila di DIY terdapat oknum yang dicurigai melakukan praktik korupsi.

“ASN dan pejabat kami sudah menandatangani kesepakatan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi. Mereka sudah bersumpah juga pada waktu diangkat untuk tidak berkhianat. Kalau itu dilakukan ya berhadapan dengan hukum. Itu konsekuensinya dan saya tidak akan melakukan apapun untuk membantunya,” terangnya.

Di samping itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Pemerintah Daerah mer-

upakan instrumen penting dalam bernegara karena menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, Sri Sultan Hamengkubowono IX telah mengingatkan bahwa ‘Takhta untuk Rakyat’.

Menurutnya, hal itu sebuah slogan yang seharusnya diresapi dan dimaknai oleh seluruh pemimpin di DIY saat ini dalam bekerja melayani rakyat. Slogan yang pada akhirnya turut dijadikan pegangan untuk tidak tergiur pada tindakan korupsi karena akan menghambat pembangunan.

“Mari kita kembalikan anti korupsi tahta untuk rakyat dengan komitmen melayani rakyat. Edukasi sejak dini dan berkelanjutan akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya korupsi,” tandasnya. (hms/ziz)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005